

Dialog

Vol. 36, No. 2, November 2012

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

Terakreditasi C No: 362/AU1/P2MBI/07/2011
ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM:
Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Badan Litbang dan Diklat
Dr. H. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bagian Umum dan Perpustakaan
Drs. H. A.M. Khaolani, M.Pd.

SEKRETARIS REDAKSI
Astuty Nilawati, S.Pd.

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)
Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. (Tafsir)
Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)
Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar (Hukum Islam)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)
Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud (Sejarah dan Kebudayaan Islam)
Prof. Dr. H. Abdul Aziz al-Bone (Pendidikan Islam)
Dr. H. Imam Tolkhah (Sosiologi Agama)
Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)
Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih al-Qur'an)
H. Chamdi Pamudji, S.H., M.M. (Pendidikan dan Pelatihan)
Drs. H. Praptono Zamzam, M.Sc. (Pendidikan dan Pelatihan)

REDAKTUR EKSEKUTIF
Dr. H. Susari, M.A.

REDAKTUR PELAKSANA (MANAGING EDITOR)
H. Sahlani, B.A.
Reza Perwira, S.Th.I.
Sofyan Yamin, S.Si.
Rahmatillah Amin, S.Kom
Wawan Hermawan, S.Kom

ALAMAT REDAKSI
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380

WEBSITE:
www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi, untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.



PENGANTAR REDAKSI







DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol.36, No.2, November 2012

HERDI SAHRASAD

Agama dan Masalah Korupsi : Sebuah Catatan: 1-18

IYOH MASTIYAH

Relasi Jender dalam Perspektif Pesantren: 19-30

NURUDIN

Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kemanusiaan: Ikhtiar Mengatasi Konflik Sosial-Keagamaan di Indonesia: 31-44

SYAHRUL KIROM

Pancasila dalam Bingkai Kerukunan Beragama : 45-64

ALI USMAN

Menguji Efektivitas Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di Indonesia : 65-80

ARIEF SUBHAN

Mencari Perspektif Terorisme di Indonesia: Kajian Awal : 81-94

SYARIPULLOH

Penanggulangan Kemiskinan : 95-112

SUDIRMAN TEBBA

Pergeseran Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia : 113-126

SUPRAPTO

Paradigma Baru Kediklatan (Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh pada Balai Diklat Keagamaan Padang : 127-148

BOOK REVIEW

AKMAL SALIM RUHANA

Terorisme [sama dengan] Jihad? : 149-166

KUMPULAN ABSTRAK 167-172

INDEKS PENULIS 173-174

MENCARI PERSPEKTIF TERORISME DI INDONESIA: KAJIAN AWAL

OLEH : ARIEF SUBHAN *)

ABSTRACT

Terdapat persepsi kuat di kalangan pengamat bahwa Asia Tenggara merupakan “front kedua” dalam “perang global melawan terorisme” —setelah negara-negara Timur Tengah sebagai “front pertama”. Sebagian yang lain bahkan menyatakan bahwa wilayah ini merupakan “surga” bagi terorisme. Di antara negara-negara di Asia Tenggara—Thailand, Malaysia, Singapura, dan Philipina—Indonesia mendapat perhatian khusus. Bukan hanya karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia—menurut Statistik 2005, negara ini dihuni tidak kurang dari 208.819.86 jiwa dengan prosentase lebih dari 90 persen Muslim. Lebih dari itu, dan barangkali yang lebih penting, karena *Jemaah Islamiyah* (JI), yang diidentifikasi sebagai jaringan lokal al-Qaeda—organisasi Muslim global di bawah komando Osama Bin Laden—di Asia Tenggara, tidak hanya diprakarsai oleh Muslim Indonesia, tetapi juga memperoleh lahan subur untuk berkembang.

Tulisan ini berusaha memberikan penjelasan tentang terorisme, latar belakang sosial dan politik munculnya terorisme di dunia Islam, dan kelompok-kelompok Islam radikal yang memberikan sumbangan terhadap munculnya sikap militan di kalangan sebagian Muslim, termasuk Indonesia.

There is a strong perception among observers that Southeast Asia is a “second front” in the “global war on terrorism” —after Middle Eastern countries as the “first front”. Others have even suggested that this region is a “haven” for terrorism. Among the countries in the Southeast Asia —Thailand, Malaysia, Singapore, and the Philippines— Indonesia has special attention. Not only because Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world —according to 2005 statistics, the country is inhabited not less than 208.819.86 soul with the percentage of more than 90 percent Muslim. Moreover, and perhaps more importantly, because of the Jemaah Islamiyah (JI), which was identified as the al-Qaeda network of local-global Muslim organization under the command of Osama Bin Laden in Southeast Asia, not only initiated by Muslim Indonesia, but also gain fertile ground for growth.

*) Arief Subhan adalah Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

This paper seeks to provide an explanation of terrorism, social and political background of the emergence of terrorism in the Muslim world, and radical Islamist groups that contribute to the emergence of militant attitude among some Muslim countries, including Indonesia.

KEY WORDS:

Terrorism, Southeast Asia, Jemaah Islamiyah, al-Qaeda network, radical Islamist group, Collective Action Theory.

A. PENDAHULUAN

Terdapat persepsi kuat di kalangan pengamat bahwa Asia Tenggara merupakan “front kedua” dalam “perang global melawan terorisme” —setelah negara-negara Timur Tengah sebagai “front pertama”.¹ Sebagian yang lain bahkan menyatakan bahwa wilayah ini merupakan “surga” bagi terorisme.² Di antara negara-negara di Asia Tenggara — Thailand, Malaysia, Singapura, dan Philipina — Indonesia mendapat perhatian khusus. Bukan hanya karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia — menurut Statistik 2005, negara ini dihuni tidak kurang dari 208.819.86 jiwa dengan prosentase lebih dari 90 persen Muslim. Lebih dari itu, dan barangkali yang lebih penting, karena *Jemaah Islamiyah* (JI), yang diidentifikasi sebagai jaringan lokal al-Qaeda — organisasi Muslim global di bawah komando Osama Bin Laden — di Asia Tenggara,³ tidak hanya diprakarsai oleh Muslim Indonesia, tetapi juga memper-

oleh lahan subur untuk berkembang.

Seperti dicatat para peneliti, JI merupakan satu di antara kelompok-kelompok Muslim radikal di Indonesia yang paling sering dikaitkan dengan terorisme. Kelompok-kelompok Muslim lain, meskipun oleh para peneliti dikategorikan radikal, tidak secara khusus dikaitkan dengan terorisme. Mengutip sebuah penelitian, kelompok-kelompok radikal di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, kelompok “nasionalis Islamis”, yaitu kelompok-kelompok yang tidak berniat mengganti ideologi negara, tetapi sebatas melakukan “purifikasi” — terkadang dengan jalan kekerasan (Lasykar Jihad [LJ] dan Front Pembela Islam [FPI]). Kedua, “antistatist Islamis”, yaitu kelompok yang berpandangan bahwa negara Indonesia sekarang ini tidak memiliki legitimasi, dan mengkampanyekan sistem khilafah sebagai alternatif (Lasykar Jundullah, Mujahidin, Angkatan Muda Mujahidin [AMIN], dan Kelompok Banten). Ketiga, kelompok yang dapat dijadikan sebagai awal munculnya kelompok-kelompok *jihadi* dan secara ideologis mengusung gagasan *Khilafah Islamiyah* (Hizbut Tahrir [HT]).⁴

¹Andrew T.H. Tan (ed.), *A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia* (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2007), h. 5.

²Kumar Ramakrishna dan See Seng Tan, *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia* (Singapura: Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University and World Scientific Publishing, 2003).

³Dalam laporan rutin yang dipublikasikan melalui cetakan dan website, International Crisis Group (ICG), juga mendiskusikan biografi ringkas dan jaringan aktor-aktor kunci pelaku teror di Indonesia.

⁴Peter Chalk, Angel Rabasa, et., all., *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia, a Net Assessment* (Santa Monica CA: Rand and Center for International Security Studies, 2009), h. 69.

Negara Indonesia sendiri, tentu saja setelah dipicu berbagai tindakan terorisme, membentuk dua buah intitusi yang secara langsung berkaitan dengan penanggulangan bahkan *counter attack* terhadap teroris. Pertama, membentuk *Detachment 88* sebagai satuan khusus di bawah Kepolisian RI. Kesatuan berkekuatan 400-an personal yang populer dengan sebutan "Densus 88" ini dibentuk pada 30 Juni 2003, tidak lama berselang setelah "Bom Bali". Kedua, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang dibentuk pada 2010 dengan mandat utama "penanggulangan terorisme". Bahwa SK Presiden RI (No. 46 th 2010) menjadi dasar pembentukannya, hanya menunjukkan nilai penting dan strategisnya badan ini. Memperkuat kedua institusi tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa khusus tentang terorisme. MUI berfatwa bahwa terorisme merupakan tindakan yang diharamkan di dalam ajaran Islam.

Menguatnya radikalisme di Indonesia, dengan berbagai indikasi tersebut, tentu saja sangat menarik. Karena dalam studi-studi tentang Islam, tidak sedikit peneliti yang memberikan karakteristik moderat pada Islam Indonesia. Clifford Geertz, dalam *Islam Observed* misalnya, sebuah studi klasik perbandingan antara Muslim Indonesia dan Maroko, menemukan kenyataan bahwa Islam Indonesia lebih moderat dibandingkan dengan saudaranya di Maroko. Argumen yang disampaikan adalah karena Islam Indonesia lebih singkretik disebabkan proses Islamisasi yang berlangsung melewati berbagai saringan kepercayaan lokal.⁵ Dua buah kelompok

⁵Clifford Geertz, *Islam Observed, Religious Development in Marocco and Indonesia* (Chicago: The University of Chicago Press, 1971).

mainstream Islam Indonesia sendiri mengindikasikan itu. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan *mainstream* organisasi Indonesia, tidak hanya ditandai dengan sikap moderat sebagai ciri khas utamanya, tetapi bahkan mempromosikannya sebagai sikap beragama yang utama.

Meskipun demikian, berbagai perkembangan yang terjadi setelah reformasi memberikan gambaran yang lebih kompleks. Setelah tiga dekade lebih berada dalam sistem kekuasaan otoritarian Orde Baru, Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi. Proses transisi ini, terutama karena pengaruh media massa, telah mengangkat berbagai isu sensitif ke dalam perbincangan (*discourse*). Isu tentang kemiskinan, inflasi, dan pengangguran, distribusi kekuasaan dan ekonomi, etnis dan agama, yang berkombinasi dengan kepentingan politik lokal, menghadapkan Indonesia pada berbagai konflik etnis dan keagamaan yang meletus setelah reformasi politik. Konflik-konflik etnis dan keagamaan di Kalimantan Barat, Maluku (Ambon), dan Poso (Sulawesi) merupakan deretan kasus kekerasan (*violence*) Indonesia pasca reformasi. Perasaan kecewa terhadap manajemen penyelesaian konflik pemerintah pusat, beberapa elemen masyarakat, khususnya sebagian komunitas Muslim, kemudian mengaspirasikan kembali ide-ide Islamisme, seperti penerapan shari'ah Islam, penegasan simbol-simbol Islam, bahkan ideologi Islam. Inilah yang kemudian menciptakan ruang bagi munculnya kelompok-kelompok militan Muslim di Indonesia yang telah disinggung di atas.⁶

⁶Lihat Anne Schiller and Bambang Garang, "Religion and Inter-ethnic Violence in Indoensia", *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 32, No. 2, 2002.

Mayoritas Muslim Indonesia (*silent majority*) tetap memelihara sikap moderat, bahkan sebagian cukup progresif, berhadapan dengan modernisasi—khususnya berkaitan dengan penerapan nilai-nilai demokrasi. Akan tetapi, “ruang yang tersedia” di bawah semangat reformasi dan sistem demokrasi itu membuka kemungkinan untuk diisi berbagai kelompok Islam dengan beragam ideologi—yang salah satu di antaranya adalah kelompok-kelompok radikal. Pada 2000, setelah kelompok-kelompok tersebut menguat, jaringan antarsesama kelompok Muslim radikal semakin terfasilitasi dengan perangkat komunikasi modern, dan JI telah muncul sebagai organisasi payung, peristiwa teror atas nama Islam, muncul ke permukaan.

Berbagai pertanyaan tentang Muslim Indonesia muncul berkaitan dengan realitas yang telah diuraikan di atas. Pertanyaan itu, terutama, mengarah kepada fenomena terorisme yang secara berkelanjutan menghiasi media massa selama satu dekade terakhir dihubungkan dengan aspek historis Islam Indonesia. Apakah sebenarnya terorisme itu? Mengapa kemudian ia menjadi alat perjuangan sebagian kecil Muslim Indonesia? Apakah Muslim Indonesia mempersepsi terorisme sebagai bagian dari *jihād*; atau menolaknya karena tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam—bahkan tidak sejalan dengan kata ‘*Islam*’ (yang secara harfiah berarti *damai*) itu sendiri. Meskipun tidak berambisi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini berusaha memberikan penjelasan tentang terorisme, latar belakang sosial dan politik munculnya terorisme di dunia Islam, dan kelompok-kelompok Islam radikal yang memberikan sumbangan terhadap

munculnya sikap militan di kalangan sebagian Muslim, termasuk Indonesia.

B. RUMUSAN DEFINISI

Apakah sesungguhnya terorisme itu? Dikaitkan dengan budaya kekerasan (*culture of violence*), maka sebenarnya tidak sulit menemukan berbagai tindakan kekerasan dalam sejarah kemanusiaan. Tindakan kekerasan itu biasanya dilakukan dengan tujuan-tujuan politik tertentu. Negara, lembaga-lembaga internasional, dan kelompok-kelompok komunal, tidak jarang melakukan tindakan kekerasan dengan alasan tindakan pertahanan diri (*self-defense*). Dalam sejumlah kasus, tindakan kekerasan dijustifikasi sebagai bentuk perlawanan terhadap tirani, penindasan, pemerintahan korup, eksploitasi; mempertahankan kedaulatan nasional, penegakan keadilan sosial, dan atas nama kemanusiaan untuk melawan *genocide*.⁷ Akan tetapi, tindakan kekerasan yang contohnya disebutkan itu tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai terorisme. Dengan demikian, penjelasan tentang terorisme membutuhkan analisis lebih mendalam dibandingkan analisis tentang kekerasan.

Terorisme memiliki sejarah dalam episode-episode kritis perjalanan sebuah bangsa, komunitas, dan kelompok kepentingan. Terorisme sendiri, sebagai sebuah kata sifat, dapat dilekatkan kepada setiap kelompok sosial; laki-laki meneror perempuan, orang dewasa meneror anak-anak, manusia meneror binatang, dan sebagainya. Dalam kaitan ini dapat dibedakan antara taktik

⁷Albert J. Bergesen and Omar Lizardo, “International Terrorism and The World-System”, *Sociological Theory*, American Sociological Association, 22:1 March, 2004, h. 38.

tindakan teror yang dipergunakan negara dan kelompok sosial. Terorisme negara mencakup berbagai tindakan teror oleh negara—yang dapat ditemukan sejak kasus “Reign of Terror” pada era Revolusi Perancis; tindakan pemberisihan, pengadilan, dan pengasingan yang dilakukan kelompok Stalinis di Uni Soviet; pengeboman kota Dresden oleh pasukan Sekutu sebagai teror terhadap penduduk Jerman pada Perang Dunia Kedua. Sedangkan terorisme oleh kelompok sosial dilakukan oleh organisasi internasional di luar negara. Dalam konteks tulisan ini, cakupan terorisme terbatas kepada yang terakhir. Hal ini tidak mengesampingkan pentingnya penelitian tersendiri mengenai tindakan terorisme oleh negara.⁸

Dalam cakupan penelitian ini, terorisme memiliki dua wajah, yaitu terorisme subnasional dan transnasional. Sebagai contoh, penembakan Presiden Anwar Sadat yang dilakukan kelompok Ikhwanul Muslimun Mesir pada 6 Oktober 1981 dapat dikategorikan sebagai terorisme domestik. Sedangkan serangan kelompok al-Qaeda terhadap menara WTC (World Trade Center) pada 11 September 2001 dapat dikatakan sebagai terorisme internasional. Contoh lain terorisme internasional adalah pembunuhan tiga warga negara Amerika di Yaman yang dilakukan warga negara Yaman dan penculikan sekaligus pembunuhan sejumlah atlet Israel pada Olimpiade Munich 1974 oleh kelompok PLO (Palestinian Liberation Organization). Meskipun demikian, bom bunuh diri yang dilakukan warga Palestina yang menjadikan Israel sebagai target tetap dikategorikan sebagai

⁸ Albert J. Bergesen and Omar Lizardo, “International terrorism”, h. 39.

terorisme domestik daripada internasional. Seperti akan diperlihatkan nanti, setelah beberapa lama terorisme telah bergeser dari “domestik menjadi internasional”.

Sejumlah sarjana telah memberikan definisi tentang terorisme. Mengutip Bergesen dan Lizardo, terorisme dapat didefinisikan sebagai “the premediated use of violence by nonstate group to obtain a political, religious, or social objective through fear or intimidation directed at a large audience”.⁹ Sarjana lain mendefinisikan terorisme sebagai “the deliberate killing of innocent people, at random, in order to spread fear through a whole population and force the hand of its political leaders”.¹⁰ Definisi lain mengatakan bahwa terorisme adalah “the use of covert violence by a group for political ends”.¹¹ Dari beberapa definisi yang dikutip dapat dikatakan bahwa terorisme mencakup beberapa aspek, yaitu (1) terorisme merupakan tindakan kolektif, bukan individual; (2) merupakan tindakan politik yang memiliki tujuan tertentu, bukan semata-mata kriminal; (3) merupakan tindakan diam-diam, tersembunyi, tidak merupakan perang konvensional; (4) dan melibatkan kekerasan. Pada hakekatnya, mengutip Oberschall, yang menjadi persoalan bukan terletak pada tujuan politik yang hendak dicapai, tetapi terletak pada metode dan strategi yang dipergunakan dalam mencapai tujuan itu. Oleh karena itu, dalam tindakan

⁹ Albert J. Bergesen and Omar Lizardo, “International terrorism”, h. 38.

¹⁰ Micheal Walzer, “Five Questions About Terrorism”, *DISSENT*, Winter 2002, h. 5.

¹¹ Anthony Oberschall, “Explaining Terrorism: The Contribution of Collective Action Theory”, *Sociological Theory*, American Sociological Association, 22:1 March, 2004, h. 26.

terorisme “the bloody drama is played before audience, and its reactions are important for the outcome”.¹²

Dalam tiga dekade lebih belakangan, terorisme mengalami perubahan dan pergeseran. Dimulai dengan pemboman WTC pada 1983, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Afrika pada 1998, dan serangan ke Pentagon dan WTC di New York pada 2001, secara dramatis konsep dan serangan terorisme telah memasuki fase baru. Sejumlah sarjana mengidentifikasinya dengan beberapa istilah, antara lain “new terrorism”,¹³ “new types of post-cold war terrorist”,¹⁴ “a new breed of terrorist”,¹⁵ “new generation of terrorist”,¹⁶ “terror in the mind of God”,¹⁷ dan “clash of fundamentalism”.¹⁸ Sejumlah istilah tersebut pada hakekatnya menyepakati satu poin penting: terorisme telah mengalami perkembangan baru yang memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Bergesen dan Lizardo mengidentifikasi pergeseran dan perkembangan terorisme dalam sejumlah poin. Pertama, organisasi teroris telah bergeser dari bentuk tradisionalnya yang bercorak hirarkis dengan komando terpusat menjadi jaringan (*networking*) antar-

individu atau kelompok dengan struktur organisasi yang longgar. Jika al-Qaeda diambil contoh, anggota organisasi ini bercorak multi etnis dan kebangsaan dengan mengedepankan aspek jaringan antarnegara. Kedua, organisasi teroris semakin sulit diidentifikasi. Peristiwa teror seringkali tidak segera diklaim oleh kelompok-kelompok dalam organisasi teroris. Peristiwa 11 September 2001 misalnya, tidak segera diklaim oleh Osama Bin Laden. Ketiga, tuntutan yang diajukan teroris semakin samar dan tidak spesifik. Ini berbeda dengan teroris di masa lalu. Peristiwa *Black September* misalnya, tuntutannya sangat spesifik, yaitu pembebasan para tahanan Palestina. Sementara itu, dalam peristiwa 11 September 2001 tuntutan yang diajukan sangat samar—bahkan tidak dikatakan sama sekali secara eksplisit. Keempat, ideologi terorisme semakin bercorak religius. Kelompok-kelompok radikal non-religious seperti IRA (*Irish Republican Army*), ETA (*Euskadi Ta Askatasuna; Basque Homeland and Freedom*), *Italian Red Brigades*, dan *Japanese Red Army* yang bercorak sekuler semakin kurang terdengar. Kelima, target terorisme semakin bersifat global. Keenam, kekerasan para teroris semakin “indiscriminate”—target dan sasaran kelompok teroris semakin bersifat umum, tidak diarahkan kepada kelompok tertentu.¹⁹

Penting ditegaskan bahwa—seperti dijelaskan dalam kutipan pada awal tulisan—terorisme semakin mengalami globalisasi. Sebagian sarjana bahkan mengatakan bahwa terdapat relasi kausalistik antara terorisme dan globalisasi. Dalam kaitan ini terorisme dilihat

¹²Anthony Oberschall, “Explaining Terrorism”, h. 29.

¹³I.O. Lesser et al., *Countering the New Terrorism* (Santa Monica, CA: RAND, 1999).

¹⁴R.A. Hudson, *Who Becomes a Terrorist and Why: The 1999 Government Report on Profiling Terrorists* (Guilford US: Lyons Press, 1999), h. 5.

¹⁵J. Stern, *The Ultimate Terrorist* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), h. 9.

¹⁶Bruce Hoffman, *Inside Terrorism* (New York: Columbia University Press, 1999).

¹⁷Mark Jurgensmayer, *Terror in the Mind of God, The Global Rise of Religious Violence* (Berkeley: University of California Press, 2000).

¹⁸T. Ali, *The Clash of Fundamentalism: Crusades, Jihad, and Modernity* (London, UK: Verso, 2002).

¹⁹Albert J. Bergesen and Omar Lizardo, “International Terrorism”, h. 42-43.

sebagai bentuk reaksi, penolakan, dan pertahanan diri terhadap kekuatan ekonomi dan budaya global yang semakin agresif. Di samping itu, penting juga digarisbawahi bahwa, Amerika Serikat—dengan segala aspeknya—merupakan negara yang paling sering menjadi sasaran terorisme—diikuti Israel, Perancis, Inggris, Jerman, negara-negara bekas Uni Soviet, Turki, Kuba, Spanyol dan Iran. Kenyataan bahwa Amerika Serikat berada di garis terdepan sasaran terorisme berkaitan dengan pengaruh geografisnya yang sangat luas tidak hanya dalam aspek ekonomi dan politik, tetapi juga pangkalan-pangkalan militernya di luar negeri. Ini karena memang setelah keruntuhan Uni Soviet, Amerika Serikat merupakan “negara super power” tunggal—tanpa saingan.

C. TERORISME INDONESIA

Terorisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konstelasi domestik, regional dan internasional. Seperti telah disinggung, reformasi politik di Indonesia yang mendorong jatuhnya pemerintahan otoritarian Presiden Soeharto—yang telah berlangsung tiga dekade lebih—telah mengantarkan negeri ini memasuki pintu gerbang demokrasi. Transisi menuju demokrasi yang berlangsung memberikan peluang politik bagi kelompok-kelompok kepentingan, khususnya dalam bentuk gerakan sosial Islam, untuk mengartikulasikan aspirasi dan ideologinya dalam ruang publik. Sebagai implikasi, Indonesia pasca reformasi menyaksikan maraknya pertumbuhan gerakan sosial Islam baru—di samping gerakan-gerakan sosial Islam lama yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan dan sesudahnya.

Studi klasik Deliar Noer telah memetakan gerakan-gerakan Islam lama tersebut.²⁰ Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan dua arus utama gerakan Islam sampai dengan periode Indonesia kontemporer. Di samping itu, terdapat sejumlah organisasi sosial Islam lain yang secara umum sebenarnya cenderung moderat. Tak dapat dipungkiri bahwa di antara organisasi sosial Islam tersebut terdapat kelompok yang mengedepankan sikap skripturalisme dalam memahami doktrin Islam. Diskusi tentang modernisasi yang berlangsung di dalam gerakan Islam Indonesia seperti yang secara detail digambarkan Deliar Noer telah menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok Islam itu bernegosiasi dengan modernisasi. Sebagai tambahan, munculnya aspirasi Islamisme pada periode menjelang dan setelah kemerdekaan mencerminkan tidak hanya kuatnya ideologi Islam, tetapi juga indikator skripturalisme tersebut. Akan tetapi, penting ditegaskan, aspirasi Islamisme itu semakin surut sejalan dengan menguatnya kekuasaan negara, khususnya pada periode Orde Baru. Apalagi pada periode tersebut aparat negara sendiri bertindak opresif terhadap segala agenda Islamisme.

Reformasi politik dan transisi menuju demokrasi seolah-olah membuka “kotak pandora” agenda Islamisme di Indonesia. Sejalan dengan euforia reformasi, ditambah krisis multidimensi yang berkepanjangan, sebagian kalangan kelompok Islam mulai menengok kembali ideologi Islam sebagai alternatif. Dalam kaitan ini munculnya organisasi

²⁰ Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973).

sosial Islam berikut penting dicatat. Pertama, munculnya organisasi transnasional di Indonesia seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini rajin membangun wacana tentang penegakan kembali *Khilafah Islamiyah* sebagai jalan menuju kejayaan Islam. Kedua, munculnya gerakan sosial Islam baru dalam skala domestik seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jundullah, Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Angkatan Mujahidin Islam Nusantara (AMIN). Ketiga, munculnya partai politik yang secara tegas menjadikan Islam sebagai ideologi dan mengagendakan Islamisme sebagai program kerja utamanya. Keempat, semakin populernya slogan “Islam is the solution” di kalangan Muslim Indonesia.

Pada periode bersamaan, Indonesia menjelang dan sesudah reformasi juga mengalami sejumlah konflik dan kekerasan yang dipicu pergesekan etnis, keagamaan, maupun ideologis. Paling tidak sejak akhir dekade 1990-an, Indonesia mengalami berbagai peristiwa konflik dan kerusakan dengan tingkat kekerasan yang luar biasa. Sepanjang 1995 dan 1996 meletus kerusakan di Situbondo, Tasikmalaya, dan beberapa kota lain di Jawa yang menyebabkan tidak hanya kerusakan harta benda, tetapi juga korban jiwa. Selanjutnya, antara 1997 sampai dengan 2002, menurut catatan lembaga-lembaga internasional, sekitar 10,000 jiwa meninggal dalam konflik etnis yang terjadi di seluruh Indonesia. Antara 1996-1997 dan 2001 dua peristiwa konflik etnis antara etnis Dayak dan Madura meletus di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sekitar 1,000 orang meninggal dan ratusan lainnya, terutama etnis Madura, kehilangan tempat tinggal. Di

Maluku sekitar 5,000 orang terbunuh dalam konflik Islam dan Kristen yang bermula sejak 1999 dan terus mengalami peningkatan eskalasi selama tiga tahun selanjutnya. Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Militer Indonesia menyebabkan paling sedikit 1,800 meninggal (catatan dalam setahun 2000-2001). Konflik bersenjata di Irian Jaya (Papua) juga menimbulkan korban jiwa.²¹

Transisi menuju demokrasi dan berbagai peristiwa konflik dan kekerasan, memberikan kesempatan politik bagi kemunculan dan pertumbuhan organisasi sosial Islam baru di Indonesia. Sebagian besar organisasi Islam—yang disebut sebagai “gerakan salafi radikal”²²—muncul pada periode pasca reformasi ini. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), kelompok terpenting yang mengusung penerapan syari’ah Islam, diresmikan 7 Agustus 2000 di Yogyakarta—selang dua tahun setelah reformasi. Abu Bakar Ba’asyir, pengasuh Pesantren Ngruki, Solo, merupakan tokoh berpengaruh di organisasi ini. Seperti diketahui, Abu Bakar Ba’asyir—termasuk Pesantren Ngruki—dikaitkan dengan aksi-aksi teror di beberapa wilayah di Indonesia. Akar ideologis MMI menghujam dalam gerakan Islam lama DI/TII yang dipimpin S.M. Kartosuwiryo.²³ Sementara itu Laskar Jihad

²¹ Lihat Jaques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (Cambridge, UK: Cambridge University press, 2004). Lembaga internasional dimaksud antara lain International Crisis Group (ICG) Indonesia; Care Human Rights Forum; Human Rights Watch; US State Department; juga Anne Schiller and Bambang Garang, “Religion and Inter-ethnic Violence in Indonesia”.

²² Lihat misalnya Jamhari dan Jajang Jahroni (ed.), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: PPIM UIN Jakarta dan RajaGrafindo Persada, 2004).

²³ Jamhari dan Jajang Jahroni (ed.), *Gerakan Salafi Radikal*, h. 48-50.

pada mulanya merupakan sayap dari Forum Komunikasi Ahlul-sunnah wal Jamaah (FKAW). Akan tetapi, pada perkembangannya, ketika keterlibatannya dengan konflik bernuansa keagamaan semakin intens—dengan konflik Ambon sebagai kasus terbesar—Laskar Jihad justru menjadi inti FKAW. Adalah Ja'far Umar Thalib yang mendeklarasikan FKAW pada 14 Pebruari 1999 di Solo, tak berselang lama setelah reformasi. Gerakan lain yang juga berpengaruh, Front Pembela Islam (FPI) dideklarasikan di Pesantren al-Umm Ciputat pada 17 Agustus 1998—masih di tengah-tengah euforia reformasi. Tokoh terdepan FPI adalah Muhammad Rizieq Syihab, yang mengenyam pendidikan di King Saud University, Riyadh, Arab Saudi.²⁴

Berkaitan dengan konstelasi internasional, terdapat sejumlah perkembangan yang memberikan pengaruh. Pertama, revolusi Iran pada 1979 merupakan ibu kandung dan inspirator gerakan Islam radikal di dunia Islam, khususnya di kalangan Muslim Shi'i. Julukan "Great Satan" terhadap Amerika Serikat—yang diberikan Ayatollah Khomeini, pemimpin spiritual tertinggi sekaligus pemimpin revolusi—ikut bertanggung jawab terhadap kekecewaan dunia Muslim, tetapi perlawanan terhadap Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Arab—seperti Arab Saudi—yang dipandang cenderung berpihak kepada kepentingan Barat. Pada hakekatnya, yang dilawan adalah modernisasi yang dinilai telah membawa

²⁴ Jamhari dan Jajang Jahroni (ed.), *Gerakan Salafi Radikal*, h. 47-156. Juga lihat Peter Chalk, Angel Rabasa, et., all., *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia, a Net Assessment* (Santa Monica CA: Rand and Center for International Security Studies, 2009), h. 67-85.

masyarakat Muslim menjauhi doktrin Islam. Bernad Lewis memberikan gambaran sebagai berikut:

Muslim fundamentalists are those who believe the trouble of the Muslim world ... are result not of insufficient modernization but excessive modernization ... i.e. imposing and importing infidel ways on Muslim peoples. The task is to remove [modernizing] rulers and expel their foreign patrons and protectors, and return to purely Islamic ways of life in accord with the principles of Islam.²⁵

Kedua, sebagai reaksi terhadap diseminasi revolusi Iran dan dukungan negara Shi'ah ini terhadap gerakan-gerakan radikal dengan target negara-negara Arab pro-Barat, negara-negara Arab seperti Arab Saudi semakin memperkuat penerapan Shari'ah Islam—sebagaimana termaktub dalam paham Wahhabisme—sebagai hukum positif. Di samping itu, Arab Saudi dan negera-negara lain di sekitarnya, juga melakukan penggalangan sumber dana dengan fasilitas perbankan modern melalui kelembagaan Islam seperti yayasan yang dipimpin ulama, masjid, lembaga pendidikan, pelayanan sosial, dan lembaga-lembaga filantropis. Akan tetapi, pada perkembangannya, lembaga-lembaga tersebut menjadi bagian dari infrastruktur jihad yang cenderung mengambil bentuk teror, terkadang bahkan diarahkan kepada kebijakan-kebijakan Arab Saudi sendiri. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar mengingat dalam perspektif teori tindakan

²⁵ Bernad Lewis, "The Revolt of Islam", *The New Yorker*, 19 November, 2001: 60-63.

kolektif (*collective action theory*), pemanfaatan lembaga-lembaga yang sudah tersedia untuk tujuan-tujuan baru merupakan langkah yang murah, cepat, dan tepat untuk melakukan mobilisasi sosial, politik, dan gerakan keagamaan. Langkah Arab Saudi itu juga diikuti Pakistan dengan mendukung kelompok-kelompok militan Islam dan lembaga pendidikannya yang ujungnya menyuburkan terorisme di wilayah Kashmir dan Taliban di Afghanistan. Seperti Arab Saudi, kebijakan ini pada akhirnya juga berimbas kepada pemerintah Pakistan sendiri.

Ketiga, *jihad* melawan tentara Uni Soviet—dan pemerintahan Komunis dukungannya. Meminjam model yang dikembangkan pemerintah Iran dalam merekrut para pejuang, pada 1980-an Osama bin Laden membentuk lembaga rekrutmen bagi Muslim sukarelawan yang siap *jihad* dan berjuang di Afghanistan. Para pejuang yang berhasil direkrut tidak hanya berasal dari wilayah Timur Tengah, tetapi juga Afrika Utara, dan Asia. Di Pakistan para *mujahidin* itu dikumpulkan, diberikan pelatihan militer, dan diindoktrinasi sampai benar-benar siap menjadi gerilyawan di Afghanistan. Amerika Serikat sendiri pada mulanya memberikan dukungan, termasuk kepada para mujahidin, dengan menyediakan peralatan militer. Berikut kutipan pernyataan Osama bin Laden:

To counter these atheist Russians, the Saudi chose me as they representative in Afghanistan. I settled in Pakistan in the Afghan border region. There I received volunteers from the Saudi Kingdom and from all over the Arab and Muslim countries. I set up my first camp where these volunteers were trai-

ned by Pakistani and American officers. The weapons were supplied by the Americans, the money by the Saudis".²⁶

Model organisasi mujahidin yang bercorak transnasional tersebut selanjutnya diadopsi Osama bin Laden dalam membangun al-Qaeda pada 1990-an. Yang diperbarui adalah perluasan rekrutmen dan funding dari kaum Muslim, baik yang berdomisili di negara-negara Muslim maupun di Eropa dan Amerika Serikat. Seperti diketahui, komunitas Muslim imigran di Eropa dan Amerika Serikat telah memiliki infrastruktur keagamaan—seperti masjid, sekolah, dan lembaga filantropi—yang tidak hanya dapat dipergunakan sebagai sarana menggali sumber keuangan, tetapi juga “tempat bersembunyi”. Dengan memanfaatkan kemudahan perjalanan antarnegara dan benua, perkembangan teknologi komunikasi, transaksi keuangan, dan mahasiswa Muslim di luar negeri, maka aktivitas al-Qaeda dapat menjangkau seluruh benua. Pada 1998, Osama bin Laden mendeklarasikan front Islam internasional untuk jihad melawan Yahudi dan Kristen. Di dalamnya antara lain ia menegaskan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban melawan Amerika dan sekutunya—sipil maupun militer—dalam rangka pembebasan Masjid al-Aqsa dan Masjidil Haram.²⁷

²⁶ A. Rashid, *Taliban* (New Heaven, CT: Yale University Press, 2001), h. 132.

²⁷ Anthony Oberschall, “Explaining Terrorism”, h. 33. Osama bin Laden merupakan aktor terdepan al-Qaeda. Di samping dipengaruhi suasana ideologis dunia Arab era 1960-an dan 1970-an seperti Wahhabisme Arab Saudi, militanisme Sayyid Qutb di Mesir, dan kekalahan Arab dalam peran melawan Israeal pada 1967. Di antara tokoh lain yang juga berpengaruh termasuk Dr. Abdullah Azzam, yang disebut-sebut sebagai pendiri Hamas; Dr. Muham-

Kedua faktor tersebut, domestik dan internasional, ditambah dengan faktor regional di mana Asia Tenggara juga dikenal sebagai wilayah konsentrasi Muslim di dunia dengan beragam kelompok-kelompok Islam, maka terorisme menjadi metode pilihan gerakan yang masih dalam cakupan pilihan. Jika dilihat secara seksama konflik-konflik yang terjadi wilayah Asia Tenggara, misalnya berkenaan dengan ketegangan—bahkan juga konflik—antara Muslim Patani di Thailand Selatan dengan pemerintah di Bangkok; konflik Muslim Moro Philipina Selatan dengan Pemerintah di Manila, dan sebagainya semakin menjadi pupuk bagi kesuburan sikap radikal di kalangan Muslim tidak hanya yang berdomisili di wilayah tersebut, tetapi seluruh Asia Tenggara. Komunikasi intensif antarmereka, interaksi-interaksi di forum-forum seminar dan sebagainya, menjadi sarana bagi gerakan-gerakan baru tersebut untuk memperoleh pengikut.

Sebagian aktivis Muslim Indonesia terlibat dalam rangkaian peristiwa yang diuraikan di atas. Mereka memiliki peluang politik untuk mendirikan organisasi sosial, mengembangkan manajemen gerakan, sebagian lain pernah terjun dalam kancah perang Afghanistan, sebagian lagi memiliki jaringan dengan organisasi serupa di wilayah Asia Tenggara, dan terus mengembangkan kapasitas untuk melakukan gerakan sosial keagamaan. Sejumlah faktor tersebut, menyediakan peluang besar dan kesempatan politik untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada terorisme. Dibaca dari perspektif teori tindakan kolektif (*collective action theory*), maka dimensi-dimensi sebuah gerakan dapat ditemukan di dalamnya. Antara lain,

kekecewaan terhadap situasi, ideologi, kapasitas untuk berorganisasi, dan kesempatan politik.²⁸ Ini menjelaskan mengapa tindakan teror kemudian juga menjadi pilihan sebagian kalangan Muslim radikal.

Dalam konteks terorisme di Indonesia—pada tingkat tertentu juga Asia Tenggara—Jemaah Islamiyah (JI) merupakan kelompok yang paling aktif mengambil peranan. JI merupakan kelompok radikal yang memiliki jaringan dengan al-Qaeda. Di samping beroperasi di Indonesia, JI juga ditemukan jejaknya di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Philipina, Malaysia, dan Singapura. Jaringanjarnya dikabarkan telah meluas memasuki Thailand dan Kamboja. JI telah dimasukkan dalam daftar kelompok teroris versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan rekomendasi pembekuan aset, menutup segala akses finansial, dan mencegah anggotanya melakukan perjalanan-perjalanan internasional.²⁹

JI didirikan pada Januari 1993 dengan menjadikan sayap militan Ikhwanul Muslimun sebagai insipirasi. Kelompok ini mulai muncul di Camp Saddah, tempat pelatihan kelompok Mujahidin Afghanistan pimpinan Abdul Rasul Sayyaf—yang memiliki hubungan dekat dengan Osama bin Laden. Meskipun demikian, pada level lokal, seperti telah disinggung, JI memiliki akar historis dalam gerakan DI/TII di Indonesia. Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar, yang sering disebut

mad Qutb, saudara Sayyid Qutb, pimpinan sayap militan di Ikhwanul Muslimun. Lihat John. L. Esposito, *Unholy War, Terror in the Name of Islam*, h. 7-8.

²⁸ Anthony Oberschall, "Explaining Terrorism", h. 27.

²⁹ Peter Chalk, Angel Rabasa, et., all., *The Evolving Terrorist Threat*, h. 87.

sebagai tokoh kunci JI, merupakan pengikut—atau minimal terinspirasi—ideologi DI/TII. Keduanya memang tidak hanya dikaitkan dengan JI, tetapi juga dengan MMI—seperti disinggung sebelumnya. Salah satu ciri khas JI, dibandingkan dengan yang lain, adalah jaringannya yang mencakup wilayah Asia Tenggara; berskala regional, dan pemihakannya yang sangat kuat terhadap Islamisme. Dalam manifesto, yang tertuang dalam Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah al-Islamiyah (PUPJI), yang disusun pada 1990-an, ditegaskan bahwa JI memiliki dua tujuan utama. Pertama, membentuk kelompok Muslim yang memiliki komitmen keislaman, baik itu aspek aqidah, sosial, politik, dan militer. Kedua, menjadikan kelompok tersebut sebagai *platform* untuk melakukan jihad militer melawan kaum kafir, politeis, murtad, ateis, dan amoral dalam rangka membangun kekhalifahan Islam.³⁰

Menarik dikemukakan bahwa menurut data yang tersedia, sebagaimana dilaporkan banyak kalangan, dapat dipastikan bahwa mereka yang berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman, atau terbunuh dalam baku tembak, ditengarai sebagai anggota JI. Aktor-aktor seperti Ridwan Isamuddin atau Hambali, warga Indonesia yang tertangkap di Thailand; Dr. Azhari, warga Malaysia yang tertembak di Malang, Jawa Timur; Nordin M. Top, warga Malaysia yang tertembak mati; Imam Samudra, palaku bom Bali yang dijatuhi hukuman dan telah dieksekusi; Fathurrahman al-Ghozi, warga Indonesia yang tertangkap di Manila; dan Mas Selamat Kastari, warga Singapura yang ter-

tangkap di Indonesia, dan masih banyak nama lain—yang disebut hanya sebagian kecil—mengindikasikan bahwa terorisme di Indonesia tidak cukup dilihat dari perpektif lokal, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek regional dan internasional. Dengan demikian, gerakan teroris di Indonesia akan mudah dikenali dengan baik.

D. PENUTUP

Pernyataan pada awal tulisan bahwa terorisme telah menjadi gelaja internasional—baik jaringan, sasaran, maupun pelaku—telah menjadi kenyataan. Pernyataan bahwa Asia Tenggara merupakan “surga bagi terorisme” dan merupakan “front kedua” perang melawan terorisme setelah Afghanistan, sepertinya juga mendapatkan dukungan fakta. Akan tetapi, penting juga didengarkan suara mayoritas Muslim menolak terorisme sebagai bentuk *jihad* (perjuangan Islam). Mereka menolak pendapat yang menyatakan bahwa pelaku teror adalah *syahid*—sesuatu yang diyakiki para pelaku itu sendiri dan dikatakan para tokoh pentingnya. Potret Indonesia sebagai negara Muslim moderat sebagaimana dikatakan para sarjana akan terus berlanjut menjadi perspektif dalam kajian-kajian tentang Indonesia.

Muslim Indonesia termasuk kompleks. Meskipun demikian, pada umumnya mereka menolak terorisme sebagai jalan perjuangan. Terdapat simpati besar kaum Muslim terhadap perjuangan sesama Muslim di belahan dunia lain. Mereka bahkan bersedia memberikan sumbangan finansial. Akan tetapi, ketika harus berhadapan dengan terorisme, pada umumnya, mereka menolak. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perasaan curiga terhadap Barat—khususnya

³⁰Peter Chalk, Angel Rabasa, et., all., *The Evolving Terrorist Threat*, h. 89-90.

Amerika Serikat—di kalangan Muslim berkenaan dengan terorisme. Sebagian kecil masyarakat, yang sudah terbiasa dengan teori konspirasi, masih meragukan berita-berita yang menyatakan bahwa Muslim adalah pelaku teror. Meskipun demikian, mayoritas tetap mempercayai bahwa teror dilakukan oleh Muslim.

Meskipun mayoritas Muslim adalah moderat, dan sebagian kecil Muslim saja yang melakukan teror, bukan berarti bahwa program-program dakwah tentang Islam moderat sudah mencapai

tujuan. Muslim Indonesia harus secara intensif berdialog dengan ide-ide modern sehingga tidak bersikap kaku dalam melihat perubahan—yang berbasis modernitas. Ide tentang demokrasi, masyarakat sipil, toleransi, kebebasan beragama, dan sebagainya—yang tercakup dalam hak-hak asasi manusia—harus menjadi basis bagi pembangunan masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, sikap-sikap radikal yang masih tersisa—seperti teror-teror yang telah terjadi—dapat dikurangi.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Albert J. Bergesen and Omar Lizardo, 2004. "International Terrorism and The World-System", *Sociological Theory*, American Sociological Association, 22:1 March.
- Anne Schiller and Bambang Garang, 2002. "Religion and Inter-ethnic Violence in Indoensia", *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 32, No. 2.
- Anthony Oberschall, 2004. "Explaining Terrorism: The Contribution of Collective Action Theory", *Sociological Theory*, American Sociological Association, 22:1 March.
- Bernad Lewis, 2001. "The Revolt of Islam", *The New Yorker*, 19 November, 2001
- Bruce Hoffman, 1999. *Inside Terrorism*, New York: Columbia University Press.
- Clifford Geertz, 1971. *Islam Observed, Religious Development in Morocco and Indonesia*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Deliar Noer, 1973. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- J. Stern, 1999. *The Ultimate Terrorist*, Cambridge, MA: Harvard University Press
- Jamhari dan Jajang Jahroni (ed.), 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: PPIM UIN Jakarta dan RajaGrafindo Persada.
- Jaques Bertrand, 2004. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, Cambridge, UK: Cambridge University press.
- John L. Esposito, 1995. *Ancaman Islam: Mitos atau Realita*, Bandung: Mizan, 1995, cet., ke-2.
- John. L. Esposito, 2002. *Unholy War, Terror in the Name of Islam*, Oxford: Oxford University Press.
- Kumar Ramakhrisna and See Seng Tan (ed.), 2003. *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia* (Si-

- ngapura: Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University and World Scientific Publishing.
- Lesser, I.O., et., all., 1999. *Countering the New Terroris*, Santa Monica, CA: RAND.
- Mark Jurgensmayer, 2000. *Terror in the Mind of God, The Global Rise of Religious Violence*, Berkeley: University of California Press.
- Micheal Walzer, 2002. "Five Questions About Terrorism", *DISSENT*, Winter.
- Peter Chalk, Angel Rabasa, et., all., 2009. *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia, a Net Assessment*, Santa Monica CA: Rand and Center for International Security Studies.
- R.A. Hudson, 1999. *Who Becomes a Terrorist and Why: The 1999 Government Report on Profiling Terrorists*, Guilford US: Lyons Press.
- A. Rashid, 2001. *Taliban*, New Heaven, CT: Yale University Press.
- Samuel P. Huntington, 1996. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, New York: Simon and Schurter.
- T. Ali, 2002. *The Clash of Fundamentalism: Crusades, Jihad, and Modernity*. London, UK: Verso.
- T.H. Tan Andrew (ed.), 2007. *A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia* (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2007), h. 5.

INDEKS PENULIS

A

Akmal Salim Ruhana

"Terorisme [sama dengan] Jihad?"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 149

Ali Usman

Kolumnis pendidikan, peneliti Lembaga Analisis Sosial dan Penguatan Masyarakat (LANSKAP) Yogyakarta

"Menguji Efektivitas Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 65

Arief Subhan

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Mencari Perspektif Terorisme di Indonesia: Kajian Awal"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 81

H

Herdi Sahrasad

Dosen tetap Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina

"Agama dan Masalah Korupsi: Sebuah Catatan"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 1

I

Iyoh Mastiyah

Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

"Relasi Jender dalam Perspektif Pesantren"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 19

N

Nurudin

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI

"Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kemanusiaan: Ikhtiar Mengatasi Konflik Sosial-keagamaan di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 31

S

Sudirman Tebba

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Pergeseran Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 113

Suprpto

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

“Paradigma Baru Kediklatan (Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh pada Balai Diklat Keagamaan Padang)”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 127

Syahrul Kirom

Dosen STAI Khozinatul Ulum Blora, Jawa Tengah, Alumnus Program Master Filsafat, Fakultas Filsafat, UGM, Yogyakarta. Alamat Rumah: Jl. Pabrik Migas No. 12 Kampung Baru Cepu Blora Jawa Tengah.

“Pancasila Dalam Bingkai Kerukunan Beragama”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 45

Syaripulloh

Pengajar FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

“Penanggulangan Kemiskinan”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 95

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

Buku (monograf)

Kuntowijoyo.1998. *Paradigma Islam, Intre-pretasi untuk Aksi*. Mizan: Ban-dung.

Artikel (Jurnal)

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star Trex: The Next Generation. *Studies in Popular Culture* 13(2): 53:65.

Situs web

Lynch, Tim. 1996. Review of DS 9 trials and tribble-ations. Psi-Phi: Bradley's Science Fiction Club. [Http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html](http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html) (accessed October 8, 1997).

7. Transliterasi berpedoman pada pedoman transliterasi Library of Congress,
8. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
9. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
10. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Dr. H. Susari, M.A. (Redaktur Eksekutif)

HP: 0821 141 70501

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

soesary@yahoo.com